Bayt ElHikmah Journal of Islamic Architecture and Locality
E-ISSN: 3025-2024
https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIAL

Pendekatan Pembangunan Wilayah Berbasis Komunitas untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Luthu Lamweu

Elysa Wulandari[1], Myna Agustina Yusuf[1], Winda Hanifah[1], Siti Zahrina Fakhrana[1]

[1]Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Syiah Kuala, Indonesia
Email: elysa_wulandari@usk.ac.id, mynayusuf@usk.ac.id, winda.hanifah@usk.ac.id, fakhrana@usk.ac.id

Abstract. *This study examines community empowerment strategies to develop Luthu Lamweu Village as a sustainable tourism destination based on community-based tourism (CBT). Strategically located in Sukamakmur District, Aceh Besar Regency, the village boasts significant tourism potential, including natural landscapes, cultural traditions, and local products such as handicrafts and traditional cuisine. However, this potential remains underutilized due to inadequate infrastructure, weak institutional frameworks, limited community capacity in tourism management, and suboptimal promotional efforts. The research utilized a descriptive method with data collected through interviews, questionnaires, observations, and Focus Group Discussions (FGD). The findings reveal a high level of community enthusiasm for tourism development, driven by an awareness of its positive economic impacts in improving local livelihoods. A participatory approach, involving skills-based training, institutional capacity building, and strengthening multi-stakeholder collaboration, has been identified as a primary strategic measure. Key recommendations include the implementation of homestay management training, development of creative economic products, conservation of local culture, and sustainable environmental management. Moreover, the establishment of local institutional frameworks, such as tourism management groups (Pokdarwis), is essential for structured and sustainable management of the village's potential. Collaboration among government bodies, private sectors, academia, and local communities is critical for the successful implementation of these strategies. By adopting a community empowerment-focused and integrated management approach, Luthu Lamweu Village has the potential to become a model for sustainable tourism destinations that balance economic, social, and environmental aspects while serving as an inspiration for other villages in Aceh Besar and beyond.*

Keywords: *community-based tourism, multi-stakeholder collaboration, sustainable tourism, participatory strategies, Luthu Lamweu Village, Aceh Besar.*

Abstrak. *Penelitian ini mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan Desa Luthu Lamweu sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan berbasis community-based tourism (CBT). Berlokasi strategis di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, desa ini memiliki potensi wisata yang signifikan, termasuk lanskap alam yang indah, tradisi budaya khas, dan produk lokal seperti kerajinan dan kuliner tradisional. Namun, pemanfaatan potensi ini masih terkendala oleh kurangnya infrastruktur, kelembagaan, kapasitas masyarakat dalam manajemen pariwisata, serta promosi yang belum optimal. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, observasi, dan focus group discussion (FGD). Hasil kajian menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap pengembangan pariwisata sangat tinggi, didorong oleh kesadaran akan dampak positif ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan lokal. Pendekatan partisipatif yang melibatkan pelatihan berbasis keterampilan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penguatan*

kolaborasi multi-stakeholder diidentifikasi sebagai langkah strategis utama. Rekomendasi utama penelitian ini mencakup pelaksanaan pelatihan pengelolaan homestay, pengembangan produk ekonomi kreatif, konservasi budaya lokal, dan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan. Selain itu, diperlukan pembentukan kelembagaan lokal seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) untuk mengelola potensi desa secara terstruktur dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi ini. Dengan pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan terpadu, Desa Luthu Lamweu berpotensi menjadi model destinasi pariwisata berkelanjutan yang mendukung keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan sekaligus menjadi contoh bagi desa lain di Aceh Besar dan wilayah sekitarnya.

Kata Kunci: *community-based tourism, kolaborasi multi-stakeholder, pariwisata berkelanjutan, strategi partisipatif, Desa Luthu Lamweu, Aceh Besar.*
Received : 2025-03-04 | Published : 2024-06-30

1. Pendahuluan

Pemberdayaan komunitas adalah proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengontrol kehidupan mereka secara sosial, ekonomi, dan politik. Menurut (Baxter et al., 2023), pemberdayaan memberikan kontrol kepada masyarakat untuk memengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, sedangkan Dushkova & Ivlieva (2024) menekankan pentingnya kesetaraan, kapasitas lokal, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial. Dalam teori bottom-up development, Chambers (1983) dan Pretty (1995) menjelaskan bahwa pembangunan berbasis masyarakat lokal mendorong inovasi dan partisipasi aktif.

Partisipasi masyarakat menjadi inti pemberdayaan, sebagaimana dijelaskan oleh Arnstein (1969) dalam Botchwey dkk. (2019) melalui model "Tangga Partisipasi," yang mengidentifikasi tahapan dari sekadar informasi hingga pengambilan keputusan bersama. Menurut Margareta & Salahudin (2022) bahwa partisipasi meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan, manfaat, dan evaluasi. Peningkatan kapasitas lokal, seperti yang didefinisikan Morgan (1997), mencakup pengelolaan sumber daya secara efektif melalui pendidikan dan penguatan kelembagaan. Indikator keberhasilan pemberdayaan, menurut Narayan (2002) meliputi kemandirian, partisipasi aktif, keberlanjutan, keadilan sosial, dan perubahan struktural yang mendukung masyarakat.

Pengembangan desa wisata berbasis *community-based tourism* (CBT) bertujuan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Menurut Suansri dk. (2003), ini mencakup integrasi budaya, kearifan lokal, dan lingkungan. Perencanaan komprehensif, seperti disarankan Setiawan dkk. (2021), melibatkan analisis SWOT dan pendekatan partisipatif. Pengelolaan desa wisata membutuhkan kelembagaan yang kuat, diversifikasi produk wisata, dan penerapan teknologi ramah lingkungan (Nugroho & Prabowo, 2023). Sinergi antar-stakeholder, sebagaimana dikemukakan Rochana dkk. (2023), melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal dalam mewujudkan keberlanjutan desa wisata.

Desa Luthu Lamweu, yang berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, memiliki posisi strategis dalam konteks pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau *Community-Based Tourism (CBT).* Lokasinya yang dikelilingi destinasi wisata populer seperti Taman Rusa dan Air Terjun Suhom menjadikan desa ini bagian dari ekosistem pariwisata regional. Menurut Suansri dkk. (2023), pengembangan desa wisata berbasis masyarakat sangat penting untuk memanfaatkan potensi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melestarikan budaya serta lingkungan. Posisi ini memberikan peluang bagi Desa Luthu Lamweu untuk menjadi simpul penting dalam jejaring wisata Aceh Besar.

Pemilihan Desa Luthu Lamweu sebagai lokasi studi didasarkan pada keberadaannya yang berdekatan dengan Air Terjun Kuta Malaka, yang tercatat sebagai salah satu alternatif destinasi wisata unggulan di Aceh oleh platform Atourin (2025) (https://atourin.com/destination/aceh/air-terjun-kuta-malaka). Rekomendasi tersebut menunjukkan potensi strategis wilayah ini dalam pengembangan pariwisata berbasis alam dan komunitas. Potensi wisata desa ini sangat menjanjikan, namun belum terkelola dengan baik. Lanskap alam yang indah, tradisi masyarakat yang khas, dan keahlian dalam kerajinan lokal adalah modal utama yang berpotensi menjadi daya tarik wisata unggulan. Desa Luthu Lamweu terletak di antara destinasi wisata populer, namun belum mampu menarik wisatawan dalam jumlah signifikan. Desa ini juga merupakan representasi dari banyak desa di Aceh Besar yang memiliki potensi serupa namun menghadapi kendala seperti kurangnya infrastruktur, kelembagaan, dan pengelolaan wisata yang terstruktur. Selain itu, keberadaan rumah-rumah tradisional yang masih mengadopsi elemen Rumoh Aceh—baik dari segi bentuk, tata ruang, maupun ornamen khas—menunjukkan adanya kekayaan budaya arsitektural yang dapat diintegrasikan sebagai atraksi wisata berbasis kearifan lokal. Rumoh Aceh merupakan simbol identitas budaya yang mengandung nilai keberlanjutan dan kearifan lokal, serta dapat diintegrasikan dengan konsep arsitektur hijau melalui teknologi ramah lingkungan untuk menjawab tantangan modernisasi dan pelestarian arsitektur tradisional (Kevin et al., 2021). Rumoh Aceh sebagai rumah adat masyarakat Aceh memiliki makna filosofis yang penting untuk diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya, sehingga pelestariannya dalam konteks pembangunan wisata menjadi sangat relevan (Elfira et al., 2023). Keberlanjutan identitas visual ini penting tidak hanya untuk pelestarian budaya, tetapi juga untuk mendukung narasi pariwisata yang autentik dan berakar dari nilai-nilai masyarakat setempat.

Kondisi eksisting Desa Luthu Lamweu menunjukkan potensi besar dalam bidang pariwisata. Lanskap alam yang indah, tradisi masyarakat yang khas, serta keahlian dalam kerajinan lokal adalah modal utama dalam menarik wisatawan. Menurut Wirdayanti dkk. (2021), keunikan dan keunggulan lokal merupakan elemen penting dalam menciptakan daya tarik desa wisata. Namun, potensi ini belum tergarap maksimal akibat kurangnya infrastruktur dan belum adanya pengelolaan yang terstruktur. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketiadaan lembaga pengelola yang mampu memfasilitasi pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Penelitian Gautama dk. (2020) menekankan pentingnya struktur organisasi lokal, seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dalam mendukung pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Menurut Goodwin & Santili (2009), pembentukan lembaga pengelola sangat krusial untuk menciptakan sinergi antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa adanya pengelolaan yang jelas, potensi desa ini cenderung tidak dapat berkembang sesuai harapan. Transformasi morfologi kota berpengaruh langsung terhadap perubahan ekologi kampung tradisional, termasuk pergeseran orientasi ruang, peningkatan kepadatan, dan melemahnya ikatan budaya serta sosial masyarakat local (Wulandari & Aulia, 2018).

Pariwisata berkelanjutan menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Wahab & Pigram (1997) menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan destinasi, sementara Gibson (2006) menyebutkan bahwa manfaat ekonomi harus adil dan berkelanjutan. Bramwell & Lane (1993) menyoroti pentingnya konservasi sumber daya alam untuk menghindari degradasi lingkungan dan overturisme. Ketiga prinsip tersebut—sosial, ekonomi, dan lingkungan—harus dikelola secara terpadu untuk mencapai keberlanjutan, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan. Metode *participatory rural appraisal* (PRA) melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan berbasis potensi dan permasalahan lokal. Teknik PRA, seperti pembuatan peta desa dan kalender musim, membantu memvisualisasikan potensi, masalah, dan peluang, serta mendorong fleksibilitas dan adaptivitas dalam perencanaan.

Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat lokal dalam merancang dan mengelola destinasi wisata sangat penting. Menurut Häusler & Strasdas (2002), CBT menekankan pada partisipasi aktif masyarakat, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan. Konsep ini memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama, yang tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga terlibat dalam pelestarian budaya dan lingkungan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah,

masyarakat, dan pelaku pariwisata lain diperlukan untuk mempercepat pengembangan. Menurut (Timothy, 1999), keberhasilan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat sangat tergantung pada adanya kemitraan yang harmonis antara pihak-pihak terkait. Hal ini juga sesuai dengan paradigma pembangunan berkelanjutan yang diusung dalam Agenda 21, yang menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang (Khan et al., 2021). Dengan pendekatan ini, pengelolaan desa wisata tidak hanya memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem dan budaya lokal.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya dalam mengintegrasikan strategi pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan kelembagaan yang adaptif di Desa Luthu Lamweu. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis data dalam menganalisis potensi dan tantangan desa. Dengan mengombinasikan analisis potensi wisata, partisipasi masyarakat, dan strategi pengelolaan yang berkelanjutan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif dan inovatif untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan desa wisata serupa di wilayah Aceh Besar maupun daerah lainnya. Pengelolaan yang tepat, Desa Luthu Lamweu dapat menjadi contoh sukses desa wisata yang tidak hanya mengangkat kesejahteraan masyarakat lokal tetapi juga mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Aceh Besar.

2. Metodologi

Lokasi studi Desa Luthu Lamweu berada di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia. Desa Luthu Lamweu, yang termasuk dalam Kemukiman Sibreh di Kecamatan Sukamakmur, yang memiliki luas wilayah 769 Ha dan menawarkan berbagai daya tarik khas berupa keindahan alam, tradisi lokal, serta kearifan masyarakatnya. Potensi ini menjadikan Desa Luthu Lamweu sangat ideal untuk pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang berkelanjutan.

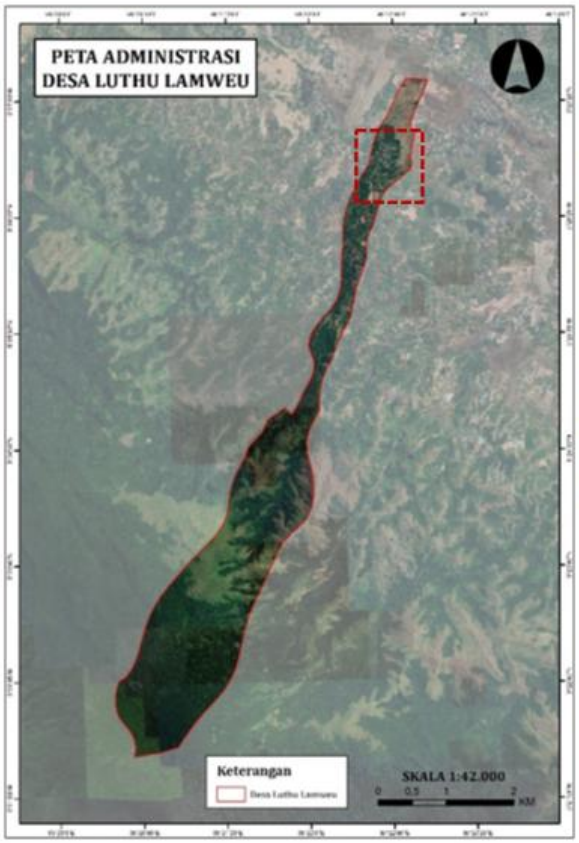

Gambar 1. Peta lokasi studi dan foto situasi Desa Luthu Lamweu, Kabupaten Aceh Besar
Sumber: Google Earth, 2024; Foto Hasil Survey, 2024

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, kuesioner, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Keempat metode ini digunakan secara terpadu untuk mendapatkan data yang mendalam, beragam, dan relevan dengan konteks pengembangan Desa Luthu Lamweu sebagai desa wisata. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci yang memiliki wawasan mendalam terkait isu yang diteliti. Pendekatan ini memberikan pandangan holistik mengenai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya desa.

Tabel 1. Data/Informasi yang dibutuhkan pada setiap informan kunci

No	Informan Kunci	Data/Informasi yang dibutuhkan
1.	Keuchik (Kepala Desa)	aspek kebijakan, program pembangunan, serta tantangan dan potensi desa
2.	Tokoh masyarakat	perspektif tentang budaya, tradisi, dan nilai lokal
3.	Pemuda gampong	aspirasi mereka sebagai agen perubahan dalam pengembangan desa
4.	Pelaku usaha (UMKM dan pengrajin)	keberlanjutan usaha dan inovasi produk lokal

Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data primer dari masyarakat. Kuesioner dirancang untuk mengeksplorasi pandangan, sikap, dan pengalaman masyarakat terkait pengembangan desa wisata. Perhitungan ukuran sampel didasarkan pada Rumus Slovin dengan margin kesalahan sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:
n = ukuran sampel
N = jumlah populasi (155)
e = batas kesalahan *(error tolerance),* misalnya 10% atau 0,1

$$n = \frac{155}{1 + 155(0{,}1)^2} = 60{,}78 \approx 61$$

Dengan menggunakan teknik simple random sampling, sebanyak 61 responden dipilih dari populasi 155 kepala keluarga. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner ini bertujuan merepresentasikan pandangan masyarakat secara keseluruhan.

Observasi lapangan dilakukan untuk mengeksplorasi potensi utama desa, seperti Air Terjun Luthu Lamweu, Rumah Aceh, dan produk UMKM lokal. Observasi pada air terjun berfokus pada keindahan alam, aksesibilitas, serta peluang pengembangan aktivitas wisata seperti trekking, fotografi, dan area piknik. Observasi terhadap Rumah Aceh menyoroti nilai budaya dan potensi edukasi tentang arsitektur tradisional. Untuk UMKM, produk unggulan seperti janeng dan olahan pisang diidentifikasi sebagai aset ekonomi lokal yang memiliki peluang pengembangan melalui inovasi produk, pengemasan, dan strategi pemasaran digital.

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan sebagai metode partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam identifikasi potensi dan tantangan di desa. FGD diikuti oleh perwakilan dusun, tokoh masyarakat, pelaku UMKM, dan kelompok pemuda, dengan tujuan menggali ide-ide pengembangan desa wisata secara komprehensif. Selain itu, FGD juga digunakan untuk memaparkan rencana pengembangan desa sekaligus mendapatkan umpan balik dari masyarakat.

Kombinasi keempat metode ini memberikan data yang komprehensif, memungkinkan analisis yang mendalam untuk mendukung perencanaan berbasis bukti dalam pengembangan Desa Luthu Lamweu menjadi destinasi wisata yang berkelanjutan. Metode analisis deskriptif digunakan dalam tulisan ini untuk menguraikan secara mendalam kondisi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Luthu Lamweu. Pendekatan ini membantu menggambarkan keberhasilan, tantangan, dan peluang yang ada berdasarkan data kualitatif dari observasi lapangan, hasil kuesioner, dan wawancara dengan masyarakat lokal. Analisis deskriptif memungkinkan identifikasi pola-pola utama, seperti keterlibatan aktif warga dalam aktivitas pariwisata, dampaknya terhadap perekonomian lokal, serta kendala yang dihadapi. Dengan metode ini, tulisan ini tidak hanya memaparkan kondisi faktual, tetapi juga memberikan dasar pemahaman yang komprehensif untuk merumuskan strategi pengembangan pariwisata yang lebih efektif di masa depan.

3. Hasil & Diskusi/ Pembahasan

Desa Luthu Lamweu memiliki potensi wisata yang menjanjikan, terutama dalam sektor alam dan budaya. Keindahan alam berupa pegunungan dan air terjun, ditambah dengan keunikan budaya lokal, menjadi daya tarik utama yang mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau *community-based tourism*. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi juga melestarikan lingkungan dan budaya setempat. Dengan posisi strategisnya yang dekat dengan destinasi wisata populer, pengembangan Desa Luthu Lamweu sebagai desa wisata berbasis CBT menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan daya tarik wisata regional secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kuesioner dan observasi lapangan, ditemukan sejumlah permasalahan dan peluang yang relevan dalam pengembangan desa wisata di Desa Luthu Lamweu. Permasalahan utama meliputi minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya kapasitas masyarakat dalam manajemen pariwisata, dan kurangnya promosi efektif. Namun demikian, antusiasme masyarakat terhadap pengembangan pariwisata sangat tinggi, terutama karena mereka menyadari dampak positif ekonomi yang dapat dirasakan langsung. Dengan keunggulan alam, budaya, dan produk lokal seperti kerajinan tangan serta kuliner khas, desa ini memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi wisata unggulan jika disertai dengan pelatihan dan pendampingan yang memadai.

Pemberdayaan komunitas menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan pengembangan pariwisata di Desa Luthu Lamweu. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pengelolaan desa wisata dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap aset wisata lokal. Strategi ini juga memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama yang menjaga keseimbangan antara pengelolaan wisata dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan komunitas tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi tetapi juga memastikan pelestarian budaya dan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

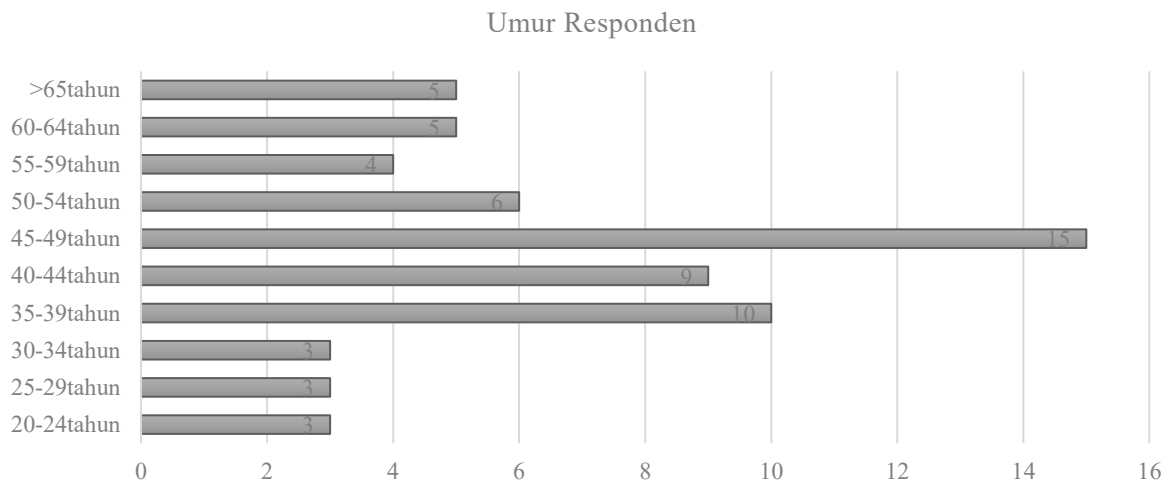

Gambar 2. Karakteristik Usia Responden
Sumber: Hasil Survey, 2024

Distribusi umur responden dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok usia 45–49 tahun merupakan yang paling dominan, dengan jumlah 15 responden dari total 61. Disusul oleh kelompok usia 35–39 tahun sebanyak 10 responden dan 40–44 tahun sebanyak 9 responden. Kelompok usia produktif (20–49 tahun) secara keseluruhan mendominasi komposisi responden, mencerminkan bahwa mayoritas partisipan berada dalam rentang usia yang aktif secara sosial dan ekonomi. Sementara itu, kelompok usia lanjut (≥60 tahun) terdiri dari 10 responden (sekitar 16%), dan hanya sedikit responden berasal dari kelompok usia muda (20–34 tahun), masing-masing hanya 3 orang per kelompok usia. Temuan ini mencerminkan bahwa keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, termasuk pengisian kuesioner, lebih banyak diikuti oleh warga usia produktif dan menjelang lanjut usia.

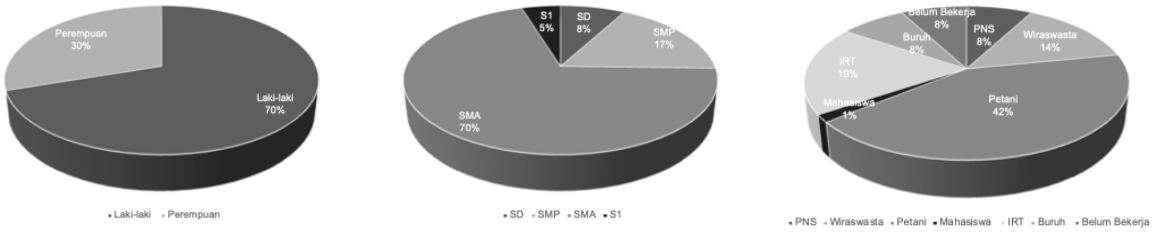

(a) (b) (c)

Gambar 3. (a) Karakteristik Jenis Kelamin Responden; (b) Tingkat Pendidikan; (c) Mata Pencaharian

Berdasarkan Gambar (a), mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki (70%), sedangkan perempuan hanya 30%, menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam pengisian kuesioner lebih dominan. Gambar (b) menunjukkan tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SMA (70%), diikuti oleh SMP (17%), SD (8%), dan hanya sedikit yang berpendidikan S1 (5%), mengindikasikan tingkat pendidikan formal mayoritas berada pada jenjang menengah. Gambar (c) menggambarkan mata pencaharian utama responden, di mana petani mendominasi dengan 42%, disusul oleh IRT 19% dan wiraswasta (14%), PNS (8%), buruh (8%), serta sisanya masih mahasiswa dan belum bekerja.

3.1. Kesiapan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Luthu Lamweu

Pemberdayaan komunitas menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan pengembangan pariwisata di Desa Luthu Lamweu. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pengelolaan desa wisata dapat berjalan lebih efektif sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap aset wisata lokal. Strategi ini juga memungkinkan masyarakat menjadi pelaku utama yang menjaga keseimbangan antara pengelolaan wisata dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan komunitas tidak hanya menciptakan manfaat ekonomi tetapi juga memastikan pelestarian budaya dan lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Hasil survei dan observasi menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Luthu Lamweu terhadap potensi wisata masih tergolong rendah. Sebanyak 42,9% masyarakat hanya memiliki pemahaman terbatas terhadap potensi wisata desanya, menunjukkan minimnya informasi yang diterima serta kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait. Rendahnya kesadaran ini dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan formal dan keterbatasan akses informasi, sehingga masyarakat belum memahami manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari pengembangan desa wisata.

Hambatan utama dalam melibatkan masyarakat pada tahap awal pengembangan meliputi minimnya pengetahuan, keterampilan, dan modal, yang memengaruhi kesediaan mereka untuk terlibat aktif. Sebanyak 81,1% responden menyebut kurangnya informasi sebagai faktor penghambat utama. Tantangan lainnya adalah persepsi negatif terhadap risiko pengembangan, seperti kekhawatiran terhadap perubahan gaya hidup tradisional, dominasi pihak luar dalam ekonomi lokal, dan dampak sosial yang mengancam harmoni masyarakat desa.

Meski demikian, masyarakat juga menyadari peluang yang dapat dihasilkan, seperti penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan melalui usaha lokal. Faktor pendorong partisipasi masyarakat termasuk adanya dukungan dari tokoh masyarakat, kepemimpinan yang inspiratif, serta pelatihan yang membuka wawasan terhadap keterampilan baru. Dengan pendekatan berbasis edukasi, pelatihan, dan kearifan lokal, masyarakat dapat diberdayakan untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengelolaan desa wisata, sehingga manfaat dapat dioptimalkan sementara risiko diminimalkan.

3.2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Awal Desa Wisata

Strategi pemberdayaan masyarakat menjadi landasan utama dalam upaya pengembangan awal desa wisata, khususnya di Desa Luthu Lamweu. Dengan memberdayakan masyarakat lokal sebagai aktor utama, pengembangan pariwisata tidak hanya bertujuan meningkatkan daya tarik wisata tetapi juga menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembahasan ini menguraikan langkah-langkah strategis yang dirancang untuk membekali masyarakat dengan keterampilan, pengetahuan, dan keterlibatan aktif dalam pengelolaan potensi wisata yang berakar pada kearifan lokal. Melalui pendekatan yang holistik dan partisipatif, strategi ini diharapkan dapat membangun fondasi yang kokoh bagi Desa Luthu Lamweu untuk berkembang sebagai destinasi wisata unggulan.

Salah satu strategi utama dalam pengembangan awal Desa Wisata Luthu Lamweu adalah pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program pelatihan yang relevan. Program-program ini dirancang untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis dan pengetahuan mendalam yang diperlukan dalam pengelolaan desa wisata. Beberapa program kunci meliputi:

Tabel 2. Program kunci pengembangan awal Desa Wisata Luthu Lamweu

No	Program Kunci	Rincian Program	Penerima Manfaat
1.	Pelatihan Pengelolaan Homestay	Pelatihan ini berfokus pada meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyediakan layanan homestay yang profesional, termasuk manajemen pelayanan, pemasaran berbasis digital, hingga pengelolaan keuangan. Hal ini akan meningkatkan daya saing desa wisata sekaligus memberikan sumber pendapatan langsung bagi masyarakat lokal.	Masyarakat pengusaha lokal

No	Program Kunci	Rincian Program	Penerima Manfaat
2.	Pelatihan Ekonomi Kreatif	Dengan menonjolkan kearifan lokal, masyarakat dilatih untuk menciptakan produk-produk bernilai tambah, seperti kerajinan tangan, kuliner khas, atau barang seni yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Program ini juga mencakup dukungan branding dan pemasaran untuk memperluas pasar produk lokal.	Pengrajin lokal
3.	Pelatihan Pelestarian Budaya Lokal	Program ini mendorong masyarakat untuk melestarikan budaya desa seperti kuliner khas dan arsitektur tradisional, misalnya Rumoh Aceh, yang dapat menjadi atraksi wisata. Pelibatan generasi muda juga menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan tradisi lokal.	Seluruh masyarakat
4.	Edukasi Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat diberikan pelatihan untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan perlindungan sumber daya alam. Upaya ini akan mendukung konsep pariwisata berbasis alam yang ramah lingkungan.	Seluruh masyarakat
5.	Pelatihan Bahasa dan Komunikasi	Untuk memperkuat interaksi dengan wisatawan, masyarakat dilatih dalam bahasa Indonesia bagi mereka yang belum menguasai bahasa nasional, serta bahasa Inggris untuk melayani wisatawan internasional. Keterampilan komunikasi yang ramah dan profesional juga menjadi fokus.	Seluruh masyarakat

Program-program tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan implementasi berkelanjutan dan hasil yang maksimal. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pelatihan, pendampingan teknis, serta pengadaan sumber daya. Selain dukungan pihak luar, tentunya keberhasilan pengembangan desa wisata Luthu Lamweu memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan partisipatif seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan musyawarah desa sangat efektif dalam melibatkan masyarakat secara kolektif. Musyawarah Desa, merupakan salah satu forum yang memberikan ruang bagi masyarakat dari berbagai kelompok, termasuk pengrajin, petani, dan pengusaha lokal, untuk menyampaikan pendapat dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap inisiatif pengembangan wisata. Melalui strategi ini, Desa Luthu Lamweu diharapkan dapat berkembang sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan dengan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam pengelolaan potensi wisata. Kombinasi antara penguatan kapasitas, pendekatan partisipatif, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengembangan desa wisata.

3.3. Kolaborasi Multi-stakeholder dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata

Kolaborasi multi-stakeholder memainkan peran kunci dalam mendukung pengembangan desa wisata, di mana keterlibatan berbagai pihak—baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat lokal, serta lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah—dapat menciptakan sinergi yang efektif.

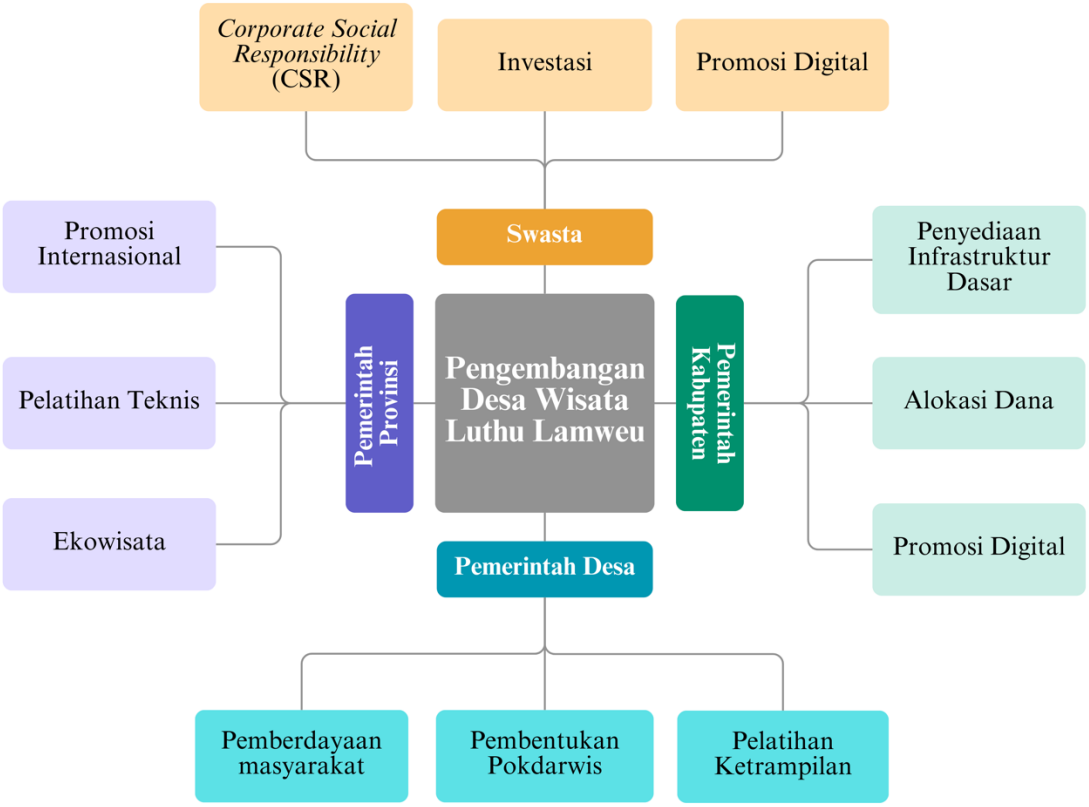

Gambar 2. Kolaborasi Multi-stakeholder dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata Luthu Lamweu

Pemerintah desa memiliki peran sentral dalam mengidentifikasi potensi lokal untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Menurut (Nasikun, 2000), pemberdayaan berbasis masyarakat melibatkan komunitas lokal dalam pengelolaan wisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan sosial budaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), yang berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam meningkatkan kapasitas komunitas untuk mengelola wisata secara mandiri (Suansri, 2023). Selain itu, pemerintah desa juga berperan sebagai fasilitator dalam menyusun program pelatihan keterampilan masyarakat, seperti manajemen *homestay*, pelayanan wisata, dan produksi barang lokal. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan wisata, menarik wisatawan, dan memperkuat daya saing desa wisata. Di samping itu, pemerintah desa perlu menjalin kemitraan dengan pihak lain, seperti pemerintah kabupaten, LSM, dan akademisi, untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan memiliki dampak jangka panjang yang berkelanjutan.

Pemerintah kabupaten memainkan peran strategis dalam pengembangan desa wisata melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan jaringan komunikasi. Keberadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya meningkatkan aksesibilitas wisatawan tetapi juga memperkuat daya tarik investasi sektor pariwisata (Nugroho et al., 2023). Selain itu, integrasi pengembangan desa wisata ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memungkinkan perencanaan strategis jangka panjang yang selaras dengan kebijakan nasional (Suharto & Wijayanti, 2022). Pemerintah kabupaten juga mendukung komunitas lokal melalui alokasi dana yang tepat, seperti penyediaan hibah untuk modal awal. Studi Rahayu et al. (2023) menunjukkan bahwa pendanaan berbasis hibah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan desa wisata.

Sebagai penghubung antara desa wisata dan pasar yang lebih luas, pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam promosi destinasi wisata di tingkat nasional dan internasional. Promosi melalui pameran pariwisata internasional dan pengembangan platform digital membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan serta memperluas jaringan mitra bisnis (Dewi et al., 2023). Selain itu, pemerintah provinsi menyediakan program pelatihan teknis berskala besar dengan melibatkan akademisi dan sektor swasta, yang mencakup pelatihan di bidang manajemen pariwisata, pemasaran digital, dan teknologi hijau (Nugraha & Santoso, 2023). Pemerintah provinsi juga bertanggung jawab dalam mendorong keberlanjutan desa wisata melalui pendekatan ekowisata. Pendekatan ini, sebagaimana diuraikan oleh (Pratama & et al., 2023), menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dukungan terhadap kebijakan inklusif yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan komitmen komunitas terhadap pengelolaan desa wisata (Rachmawati & Wijaya, 2023).

Sektor swasta menjadi mitra strategis dalam pengembangan desa wisata melalui investasi pada fasilitas pariwisata, seperti akomodasi, restoran, dan infrastruktur pendukung lainnya. Putra Utama et a. (2023) mencatat bahwa investasi sektor swasta mempercepat pembangunan fisik desa wisata dan meningkatkan daya tarik destinasi. Dukungan sektor swasta dalam promosi digital juga signifikan, terutama untuk menjangkau pasar milenial yang lebih mengandalkan informasi daring. Selain investasi, sektor swasta juga mendukung pelatihan dan pengembangan kapasitas masyarakat lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Program CSR ini mencakup pelatihan manajemen pariwisata, pemasaran, dan pengelolaan usaha kecil. Studi Rahayu et al. (2023) menunjukkan bahwa keterlibatan sektor swasta melalui CSR menciptakan sinergi antara keberlanjutan bisnis dan kesejahteraan masyarakat, sehingga memperkuat pembangunan desa wisata yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Desa Luthu Lamweu memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat (CBT) dengan kekayaan alam dan budaya lokal sebagai daya tarik utamanya. Pengembangan desa wisata ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti minimnya infrastruktur, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam manajemen pariwisata, serta kurangnya promosi, antusiasme masyarakat terhadap pengembangan pariwisata sangat tinggi. Dengan pemberdayaan komunitas melalui program pelatihan yang terarah, serta dukungan kolaboratif dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan organisasi non-pemerintah, Desa Luthu Lamweu dapat menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam pengelolaan desa wisata, dimana masyarakat lokal berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara pengelolaan wisata dan pelestarian lingkungan. Strategi pemberdayaan yang berbasis pada pelatihan keterampilan, peningkatan kesadaran, dan pendekatan partisipatif akan memastikan bahwa masyarakat dapat mengelola potensi wisata desa secara mandiri dan berkelanjutan. Kolaborasi multi-stakeholder yang melibatkan berbagai pihak menjadi kunci untuk menciptakan sinergi yang memperkuat kapasitas lokal dan meningkatkan daya saing Desa Luthu Lamweu sebagai destinasi wisata yang menarik dan ramah lingkungan.

Referensi

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Baxter, S., Barnes, A., Lee, C., Mead, R., & Clowes, M. (2023). Increasing public participation and influence in local decision-making to address social determinants of health: a systematic review examining initiatives and theories. *Local Government Studies*, *49*(5), 861–887. https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2081551

Botchwey, N. D., Johnson, N., O'Connell, L. K., & Kim, A. J. (2019). Including Youth in the Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, *85*(3), 255–270. https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1616319

Bramwell, B., & Lane, B. (1993). Sustainable Tourism: An Evolving Global Approach. *Journal of Sustainable Tourism*, *1*(1), 1–5. https://doi.org/10.1080/09669589309450696

Chambers, Robert. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Routledge.

Dewi, M., & et al. (2023). Promosi pariwisata oleh pemerintah provinsi dan pengembangan pasar desa wisata. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, *2*(15), 45–56.

Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 16, Issue 19). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/su16198700

Elfira, Y., El Faridy, Z. F., & Putra, R. A. (2023). Identifikasi Konsep Arsitektur Tradisional Aceh Pada Bangunan Pemerintahan di Banda Aceh (Studi Kasus: Kantor Gubernur Aceh). *Journal of Islamic Architecture and Locality*, *1*(1), 40–47. https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/JIAL

Gautama, A., & et al. (2020). The Importance of Local Organizations in Community-Based Tourism Management. *Journal of Sustainable Tourism*, *4*(28), 512–530. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1739536.

Gibson, R. B. (2006). Beyond the Pillars: Sustainability Assessment as a Framework for Effective Integration of Social, Economic and Ecological Considerations in Significant Decision-Making. *Journal of Environmental Assessment Policy and Management*, *8*(3), 259–280. www.worldscientific.com

Goodwin, H. J., & Santili, R. (2009). *Community-Based Tourism: a success?* https://www.researchgate.net/publication/265278848

Häusler, N., & Strasdas, W. (2002). Participatory Approaches in Community-Based Tourism. *Journal of Tourism Research*, *2*(18), 99–107.

Kevin, M. A., Fuady, M., Izziah, Wulandari, E., & Dewi, C. (2021). Green structure and green technology in preserving traditional architecture of Rumoh Aceh. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *881*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/881/1/012036

Khan, M. R., Khan, H. U. R., Lim, C. K., Tan, K. L., & Ahmed, M. F. (2021). Sustainable tourism policy, destination management and sustainable tourism development: A moderated-mediation model. *Sustainability (Switzerland)*, *13*(21). https://doi.org/10.3390/su132112156

Margareta, P. S., & Salahudin, S. (2022). Community Participation in Regional Development Planning: A Literature Review. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 121–132. https://doi.org/10.33701/jtp.v13i2.1584

Morgan, P. (1997). *The Design and Use of Capacity Development Indicators*.

Narayan, D. (2002). *Empowerment and poverty reduction- A sourcebook*. DC: World Bank.

Nasikun, M. (2000). Pemberdayaan berbasis masyarakat dalam pengelolaan desa wisata. *Jurnal Pembangunan Sosial*, *2*(6), 34–45.

Nugraha, A., & Santoso, E. (2023). Kolaborasi antara pemerintah provinsi, akademisi, dan sektor swasta dalam pelatihan manajemen pariwisata. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Manusia*, *3*(12), 67–78.

Nugroho, I., & Prabowo, P. (2023). *Pengelolaan Berbasis Komunitas dalam Desa Wisata*. Gadjah Mada University Press.

Nugroho, S., & et al. (2023). Pentingnya infrastruktur dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, *1*(14), 89–101.

Pratama, R., & et al. (2023). Pendekatan berbasis ekowisata untuk menjaga keberlanjutan desa wisata. *Jurnal Ekowisata Indonesia*, *2*(7), 102–113.

Pretty, J. N. (1995). Participatory Learning for Sustainable Agriculture. *World Development*, *23*(8), 1–17. https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00046-F

Putra Utama, R., Taskurun, & Jennah, F. (2023). Book review: Econometric Modelling and forecasting of tourism demand methods and applications, Doris ChenguangWu, Gang Li, Haiyan song (Eds). Routledge (2023). *Journal of Hospitality and Tourism Management*, *56*, 493–494. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2023.08.011

Rachmawati, Y. , & Wijaya, D. (2023). Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk keberlanjutan desa wisata. *Jurnal Pembangunan Komunitas*, *2*(11), 50–61.

Rahayu, P., & et al. (2023). Pemberdayaan berbasis pendanaan untuk pengelolaan desa wisata. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Lokal*, *1*(13), 25–37.

Rochana, M. A., Prasetyo, D. P., & Kusuma, R. (2023). *Stakeholder Collaboration in Sustainable Tourism Development*. Elex Media Komputindo.

Setiawan, R., Wahyuni, S., & Arifin, T. (2021). *Spatial Planning for Rural Tourism Development*. ITB Press.

Suansri, P. (2023). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengelolaan desa wisata secara mandiri. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, *1*(5), 14–26.

Suansri, P., Sewatarmra, B., Momtakhob, K., Lejeune, J., & Richards, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook (Responsible Ecological Social Tour-REST)*. Responsible Ecological Social Tour-REST.

Suharto, T., & Wijayanti, A. (2022). Sinergi kebijakan regional dan nasional dalam pengembangan destinasi pariwisata berbasis komunitas. *Jurnal Kebijakan Pariwisata*, *3*(10), 78–89.

Timothy, D. J. (1999). Participatory Planning for Sustainable Tourism Development. *Annals of Tourism Research*, *3*(26), 551–573. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0160-7383(99)00025-4

Wahab, S., & Pigram, J. J. (1997). *Tourism, Development, and Growth: The Challenge of Sustainability*.

Wirdayanti, E., & et al. (2021). Local Uniqueness as a Key Factor in Village Tourism Development. *Journal of Rural Studies*, *46*, 47–59. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.01.009

Wulandari, E., & Aulia, F. (2018). Pengaruh Morfologi Kota terhadap Ekologi Perkampungan Tradisional di Kota Banda Aceh, Indonesia. *Jurnal Arsitektur ZONASI*, *1*(1), 45. https://doi.org/10.17509/jaz.v1i1.11668